

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PAILIT DAN HAK PREFEREN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	20
A. Pailit dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Pailit dalam Hukum Islam	20
2. Dasar Hukum pailit (<i>Taflīs</i>)	23
3. Ketentuan Hukum tentang pailit (<i>Taflīs</i>)	24
4. Pendapat Ulama tentang Pailit (<i>Taflīs</i>)	24

B.	Hak Preferen (Istimewa) dalam perkara kepailitan di Indonesia menurut Hukum Islam	27
C.	Pailit menurut Hukum Positif.....	31
	1. Pengertian Pailit menurut Pakar Hukum.....	31
	2. Dasar Hukum Pailit.....	33
D.	Hak Preferen dalam Kepailitan di Indonesia menurut Hukum Positif (KUHPerdata dan Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)	33
	1. Pengertian Hak Preferen.....	35
	2. Sifat-sifat dan keistimewaan Hak Preferen dibandingkan hak lainnya.	35
	3. Tingkatan-tingkatan piutang yang didahulukan	42
	4. Kedudukan Kreditur dalam Penjaminan Hak Tanggungan.....	51
	5. Kedudukan Kreditur pemegang Hak Tanggungan apabila debitur pailit	52
BAB III	DESKRIPSI KEPAILITAN DI INDONESIA.	54
A.	Kepailitan di Indonesia.	54
	1. Syarat untuk dapat mengajukan pailit.....	54
	2. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit.....	54
	3. Syarat yuridis pengajuan pailit.	55
B.	Langkah-langkah dalam proses kepailitan di Indonesia.	55
C.	Daftar nama perusahaan/pengusaha yang dinyatakan pailit di Indonesia.....	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMEGANG HAK PREFEREN DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA.	75
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap pemegang Hak Preferen dalam Proses kepailitan di Indonesia	75

B.	Analisis Hukum Positif Terhadap pemegang Hak Preferen dalam Proses kepailitan di Indonesia	82
C.	Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemegang hak Preferen dalam Kepailitan di Indonesia.....	87
	1. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemegang hak Preferen dalam Kepailitan di Indonesia. ..	87
	2. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemegang hak Preferen dalam Kepailitan di Indonesia. ..	88
BAB V	PENUTUP.....	90
A.	Kesimpulan.	90
B.	Saran.	91
DAFTAR PUSTAKA		92